



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN  
DIREKTORAT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 11, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1 JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3511486, FAKSIMILE (021) 3511486, SITUS [www.depkeu.go.id](http://www.depkeu.go.id)

Nomor : Und-123/PK.3/2015

22 Oktober 2015

Lampiran : Satu berkas

Hal : Undangan FGD

Yth. Terlampir.

Sehubungan dengan penyaluran Pajak Rokok ke RKUD Provinsi dan pelaksanaan pemanfaatan kegiatan yang didanai dari Pajak Rokok serta estimasi pendapatan Pajak Rokok TA 2016 bagi daerah, kami bermaksud mengundang Saudara untuk hadir dalam acara *Focus Group Discussion* (FGD) Pajak Rokok yang akan diselenggarakan pada:

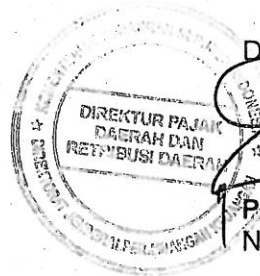
Hari/Tanggal : Selasa/ 3 November 2015

Jam : 08.00 WIB s.d selesai

Tempat : Aula Nusantara  
Gedung Radius Prawiro Lantai 1  
Jl. Dr. Wahidin No.1, Jakarta 10710

Agenda : 1. Kebijakan Umum dan Estimasi Pendapatan Pajak Rokok TA 2016.  
2. Penganggaran dan Pemanfaatan Dana Pajak Rokok.

Demikian disampaikan, atas kehadiran Saudara kami ucapkan terima kasih.



Direktur,

  
Putut Hari Satyaka Y  
NIP 19730709 199803 1 001

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN  
DIREKTORAT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 11, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1 JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3511486, FAKSIMILE (021) 3511486, SITUS [www.depkeu.go.id](http://www.depkeu.go.id)

Nomor : Und-123/PK.3/2015

22 Oktober 2015

Lampiran : Satu berkas

Hal : Undangan FGD

Yth. Terlampir.

Sehubungan dengan penyaluran Pajak Rokok ke RKUD Provinsi dan pelaksanaan pemanfaatan kegiatan yang didanai dari Pajak Rokok serta estimasi pendapatan Pajak Rokok TA 2016 bagi daerah, kami bermaksud mengundang Saudara untuk hadir dalam acara *Focus Group Discussion* (FGD) Pajak Rokok yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa/ 3 November 2015

Jam : 08.00 WIB s.d selesai

Tempat : Aula Nusantara  
Gedung Radius Prawiro Lantai 1  
Jl. Dr. Wahidin No.1, Jakarta 10710

Agenda : 1. Kebijakan Umum dan Estimasi Pendapatan Pajak Rokok TA 2016.  
2. Penganggaran dan Pemanfaatan Dana Pajak Rokok.

Demikian disampaikan, atas kehadiran Saudara kami ucapkan terima kasih.



Direktur,

Putut Hari Satyaka Y  
NIP 19730709 199803 1 001

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

**Jadwal dan Susunan Acara**  
**Focus Group Discussion (FGD) Pajak Rokok**

Waktu (WIB)	Materi Acara	Keterangan
<b>Selasa, 3 November 2015</b>		
08.00 -- 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
08.30 -- 08.45	Pembukaan	Panitia
08.45 -- 09.15	Keynote Speech	Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kemenkeu
09.15 -- 09.30	Coffee Break	
09.30 -- 11.00	Sesi I Materi : 1. Kebijakan Umum Pajak Rokok. 2. Estimasi Pendapatan Pajak Rokok TA 2016.	Kasubdit Sinduktek, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
11.00 -- 12.30	Sesi II Materi : Penganggaran dan Pemanfaatan Dana Pajak Rokok	Direktur Pendapatan Daerah, Kemendagri
12.30 -- 13.15	Istirahat	
13.15 -- 14.45	Diskusi / Tanya Jawab	Moderator & Narasumber
14.45 -- 15.00	Penutupan	Panitia

**Daftar Undangan  
Focus Group Discussion (FGD) Pajak Rokok  
Selasa, 3 November 2015**

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Biro Keuangan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jambi;
5. Kepala Biro Keuangan Provinsi Jambi;
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
7. Kepala Biro Keuangan Provinsi Sumatera Selatan;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
9. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu;
10. Kepala Biro Keuangan Provinsi Bengkulu;
11. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
12. Kepala Biro Keuangan Provinsi Lampung;
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
14. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung;
15. Kepala Biro Keuangan Provinsi Kep. Bangka Belitung;
16. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
17. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
18. Kepala Biro Keuangan Provinsi Kepulauan Riau;
19. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
20. Kepala Biro Keuangan Provinsi DKI Jakarta;
21. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
22. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Banten;
23. Kepala Biro Keuangan Provinsi Banten;
24. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
25. Kepala Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat;
26. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
27. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
28. Kepala Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah;
29. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
30. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta;
31. Kepala Biro Keuangan Provinsi D.I. Yogyakarta;
32. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta;
33. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;
34. Kepala Biro Keuangan Provinsi Jawa Timur;
35. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur;
36. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bali;
37. Kepala Biro Keuangan Provinsi Bali;
38. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;
39. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

40. Kepala Biro Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
41. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
42. Kepala Biro Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
43. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
44. Kepala Biro Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan;
45. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.